

Abstract

This writing discuss one of the contemporary issues in today's global trade relations, the overlapping degree between trade and environmental policy. The presented case study explore the political skirmish that arises from the introduction of a higher environmental standard in a unilateral manner.

A complex political problem is present in the European Union's attempt to introduce higher environmental standard for biofuel in its market. Through this standard, EU seek to ensure that all the crops used as the biofuel are produced in environmentally responsible way. To do so, this standard contain list of crops deemed as sustainable and unsustainable source of biofuel, based on the calculation of green-house-gases savings estimation. The crops listed in the unsustainable category will receive less favorable treatment in the EU's market. Inevitably this standard exerts adverse effect for crops listed in the unsustainable category. The Crude Palm Oil inclusion in the unsustainable category, ignites strong reaction from the Palm Oil producing countries, including Indonesia.

This writing then, takes place as an effort to understand the political process that shape the response of Indonesian government towards the EU's biofuel sustainability standard. By doing so, this writing will serve as an academic insight to understand the perplexity of international trade issue in today's world. Particularly in terms of its overlapping degree with non-trade issues and the impact of diminishing dichotomy between international – domestic political sphere.

Keyword: CPO, International Trade, Trade Dispute, Environment, European Union, Indonesia, RED, Biofuel, Renewable Energy.

Word count: 14,769

Abstraksi

Tulisan ini berisikan pembahasan tentang salah satu isu utama dalam hubungan perdagangan antara negara dewasa ini, yakni tumpang tindih yang ada diantara kebijakan perdangan dan lingkungan. Studi kasus yang disajikan bertujuan untuk mengkaji permasalahan politik yang muncul dari penerapan standar lingkungan yang bersifat lebih restriktif secara unilateral.

Permasalahan politik yang kompleks muncul dari usaha Uni Eropa untuk menerapkan standard lingkungan yang tinggi bagi bahan bakar nabati yang beredar di dalam pasar Uni Eropa. Melalui standard ini, Uni Eropa ingin memastikan bahwa seluruh tumbuhan yang digunakan sebagai bahan bakar nabati diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Uni Eropa membuat standar yang mencantumkan daftar tanaman yang dianggap sebagai sumber bahan bakar nabati yang ramah lingkungan dan yang tidak ramah lingkungan berdasarkan perkiraan jumlah penghitungan pengurangan emisi gas buangan yang dihasilkan. Tanaman – tanaman yang dianggap tidak ramah lingkungan, akan menerima perlakuan yang kurang menguntungkan di dalam pasar Uni Eropa. Secara langsung, hal ini berdampak kepada menurunnya kemampuan tanaman – tanaman yang dianggap kurang ramah lingkungan untuk bersaing di pasar Uni Eropa. Hal ini memunculkan reaksi kuat dari negara – negara yang memproduksi tanaman tersebut, termasuk dari Indonesia yang memproduksi Minyak Kelapa Sawit.

Lewat tulisan ini, penulis berusaha untuk memahami proses politik yang membentuk reaksi pemerintah Indonesia kepada standar bahan bakar nabati yang diberlakukan Uni Eropa. Dalam usaha tersebut tulisan ini juga akan menjadi sebuah kajian yang bertujuan untuk memahami rumitnya isu perdagangan internasional dewasa ini. Terutama yang disebabkan oleh tumpang tindih isu peradagangan dengan isu non-perdagangan dan menipisnya batasan antara ranah